

## 346 Anggota DPR Ikut Paripurna, 260 Virtual dan 86 Hadir Langsung

JAKARTA (IM) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/3).

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Ketua DPR Puan Maharani serta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, dan Wakil Ketua DPR Rachmad Gobel, juga hadir dalam rapat tersebut.

Azis mengatakan, anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna itu berjumlah 346 orang yang terdiri dari 86 orang hadir secara fisik dan 260 orang hadir secara virtual. "Telah dihadiri fisik 86 dan 260 virtual sehingga total berdasarkan mekanisme tata tertib Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia maka kehadiran telah memenuhi kuorum dan kami menyatakan kuorum untuk kita semua," kata Azis dikutip dari tayangan akun YouTube DPR RI, Senin (8/3).

Setelah itu, politikus Partai Golkar tersebut mengetok palu tanda rapat paripurna dibuka dan terbuka untuk umum.

"Berkenaan dengan Masa Persidangan IV Tahun 2021 yang rencananya insya Allah akan kita buka pada hari ini pada tanggal 8 Maret 2021, maka izinkan saya untuk membuka rapat ini dan kami nyatakan terbuka untuk umum," kata Azis.

Selanjutnya, Azis mengajak peserta rapat untuk berdoa dan meminta agar mendapat musibah dan jatuh sakit di tengah pandemi Covid-19. ● me

## Korupsi Rp1,8 M, Kejati Serahkan Sekda Riau Nonaktif ke JPU

RIAU (IM) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menyerahkan tersangka kasus dugaan korupsi Sekretaris Daerah Nonaktif Riau, Yan Prana dan barang bukti ke jaksa penuntut umum. Yan segera menjalani persidangan.

"Sekitar Pukul 11.30 WIB telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti atas nama YP kepada penuntut. Saat ini penahanan sudah beralih dari penyidik ke penuntut umum," kata Asintel Kejati Riau, Raharjo Budi Kisananto di kantornya, Senin (8/3).

Selanjutnya, kata Raharjo, jaksa penuntut umum akan menyusun dakwaan sebelum proses sidang. Dalam menyusun dakwaan, jaksa penuntut tetap menahan Yan Prana.

"Penuntut umum mulai menyusun surat dakwaan. Kewenangan untuk penahanan 20 hari, tetapi apabila tidak cukup dapat diperpan-

jang," katanya.

Raharjo berharap kasus Yan Prana segera disidangkan di Pengadilan Negeri Tipikor Pekanbaru. Sehingga, dapat dilihat duduk perkara kasus yang menjerat Yan tersebut.

"Mudah-mudahan kasus tipikor atama YP ini segera dilimpahkan ke PN Tipikor Pekanbaru. Sehingga ini dapat diketahui apakah YP bersalah atau tidak, kita ikuti perkembangan sidangnya," kata Raharjo.

Diketahui, penyidik Kejati Riau menetapkan Yan Prana Indra Jaya, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada 22 Desember 2020 lalu. Yan diduga korupsi saat masih menjabat sebagai Kepala Bappeda Siak.

Dalam penetapan tersangka, Yan diduga memotong dana rutin di Kantor Bappeda Siak. Perbuatan Yan merugikan negara Rp 1,8 miliar. ● me



IDN/ANTARA

## WAKSINASI COVID-19 SINOVAC UNTUK PEMUKA AGAMA

Petugas medis menyuntikan vaksin Covid-19 Sinovac kepada seorang pemuka agama di Klinik Nahdlatul Ulama, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin (8/3). Vaksinasi tahap kedua dengan sasaran 154 orang di kalangan ulama, pendeta dan pemuka agama lainnya tersebut sebagai upaya penanganan pandemi serta sosialisasi kepada masyarakat bahwa vaksin Covid-19 itu halal dan aman.

## Sekjen dan Dirjen Kemensos Ngaku Pernah Terima Sepeda Brompton

JAKARTA (IM) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial Hartono Laras serta Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Pepen Nazaruddin, mengaku pernah menerima sepeda merek Brompton.

Pengakuan itu disampaikan saat bersaksi di persidangan untuk dua terdakwa penyuaup mantan Menteri Sosial Juliani Peter Batubara, yakni Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanajati, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/3).

"Kami memang Agustus (2020) itu menerima Brompton, yang mengantar itu sopirnya Adi," kata Hartono saat sidang, Senin (8/3).

Adapun Adi yang dimaksud merupakan Adi Wahyono selaku Kabiro Umum Sekretariat Jenderal Kemensos sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Kantor Pusat Kemensos tahun 2020 dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan bansos Covid-19.

Adi juga menjadi tersangka di kasus ini. Hartono mengaku tak mengetahui harga dari sepeda yang diterimanya tersebut. Sebab, sepeda itu sudah diminta untuk dikembalikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK Muhammad Nur Asya kemudian menanyakan keperluan Hartono menerima sepeda tersebut.

"Ya di bulan Agustus itu kita bersepeda," ucap Hartono.

"Ada tidak kaitan dengan jabatan saudara?" tanya jaksa Azis.

"Tidak," kata Hartono menanggapi.

"Memang tidak ada sepeda dari kantor?" tanya jaksa Azis.

"Tidak ada yang di kantor," ungkap Hartono.

Sementara itu, menyual uang, Hartono mengungkapkan bahwa Adi pernah mau memberi uang. Akan tetapi, ia mengaku tidak menerimanya. Di sisi lain, Pepen juga mengaku menerima sepeda Brompton dari Adi.

"Iya (terima sepeda Brompton) dari Pak Adi KPA," kata Pepen dalam sidang yang sama. Namun, Pepen menegaskan, ia menolak uang yang berkaitan dengan kasus bansos Covid-19 ini.

Adapun Harry dan Ardian didakwa menyuaup Juliani dan sejumlah pejabat di Kementerian Sosial terkait kasus dugaan suap bansos penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek di tahun 2020. Harry didakwa memberi suap sebesar Rp 1,28 miliar, sedangkan Ardian didakwa memberi uang sejumlah Rp 1,95 miliar. Menurut JPU, uang tersebut diberikan terkait penunjukkan kedua terdakwa sebagai penyidik bansos Covid-19 pada Kemensos tahun 2020. ● han

# 2 Polhukam

IDN/ANTARA



## RAPAT PARIPURNA PEMBUKAAN MASA SIDANG DPR

Ketua DPR Puan Maharani (kanan) berpidato pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/3). Rapat Paripurna yang diikuti oleh 86 anggota DPR yang hadir secara fisik dan 260 orang secara virtual tersebut beragenda pidato pembukaan masa persidangan oleh Ketua DPR.

# Menanti Sikap Resmi Pemerintah atas Dualisme Partai Demokrat

Dualisme Partai Demokrat menuai kritikan dari berbagai pihak lantaran melibatkan Moeldoko selaku pejabat yang berada di lingkungan Istana Kepresidenan.

JAKARTA (IM) - Partai Demokrat yang dibesut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kini mengalami dualisme setelah terpilihnya Moeldoko dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (5/3).

Berlangsungnya KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, memancing reaksi negatif dari banyak kalangan. Menariknya, reaksi negatif itu tak hanya datang dari internal Demokrat, tetapi juga dari berbagai pihak, termasuk partai politik lain seperti Partai

Nasdem.

Ketua Umum Nasdem Surya Paloh bahkan langsung menyampaikan keprihatinannya atas dualisme yang terjadi di Partai Demokrat. Surya Paloh berharap seluruh pihak yang terkait dengan dualisme di Partai Demokrat dapat menyelesaikan persoalan tersebut sesuai dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia pun meminta semua pihak baik yang berada di internal maupun di luar Partai Demokrat menghormati kedaulatan partai besutan SBY

tersebut.

"Bagaimana pun, Demokrat adalah partai yang telah menjadi bagian dari kehidupan demokrasi kita. Demokrat memiliki keadaulatan yang oleh karena itu, jangan sampai, masalah atau kemelut yang terjadi tidak mengindahkan norma dan kewibawaan partai," kata Surya Paloh dalam keterangan tertulisnya.

Dualisme Partai Demokrat juga memancing kritik dari berbagai pihak lantaran perebutan tampuk kekuasaan dilakukan oleh Moeldoko selaku pejabat yang berada di lingkungan Istana Kepresidenan.

Predikat Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan secara tak langsung membuat publik berspekulasi adanya keterlibatan pemerintah dalam upaya melengserkan klan SBY dari kuris Ketua Umum De-

demokrat. Ditambah pula, Moeldoko bukanlah kader yang sejak lama turut berkegiatan membesarkan Demokrat.

Nama Moeldoko diorbitkan secara tiba-tiba oleh para kader Demokrat yang bersebrangan dengan AHY selang sebulan sebelum KLB diselenggarakan.

Meskipun Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD membantah pemerintah terlibat dalam upaya pergantian pucuk pimpinan di Partai Demokrat, publik tetap berspekulasi Moeldoko sebagai representasi dari pihak penguasa.

Karena itu, peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus bicara soal kisruh Partai Demokrat yang melibatkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Siti Zuhro menuturkan, keterlibatan Moeldoko dalam kisruh Partai Demokrat tidak bisa dilepaskan dari profil sebagai salah satu orang di lingkungan terdekat Jokowi.

Menurut Siti Zuhro, manuver Moeldoko itu akan mempertaruhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, pihak Istana, maupun Jokowi sendiri. Ia menegaskan, keterlibatan pejabat aktif pemerintahan dalam konflik yang tengah mendera sebuah partai

merupakan tindakan yang tidak etis.

Oleh sebab itu, Siti Zuhro menilai, dalam isu ini, Jokowi harus angkat bicara dan tidak bisa diam begitu saja.

"Ini yang harus diambil langkah hati-hati dan tangkas oleh Pak Jokowi, Pak Jokowi tidak bisa mendiamkan, tidak perlu merespon dan sebagainya, tidak, kali ini Pak Jokowi harus merespons, itu menurut saya," ujar Siti Zuhro.

Adapun dalam waktu dekat kubu kontra-AHY yang melangsungkan KLB dengan menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum akan segera mendaftarkan kepengurusan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Menanggapi hal tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, pemerintah hingga kini menganggap AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat.

"Yang betul AD/ART yang diserahkan tahun 2020 bernomor MHH 9 Tahun 2020 bertanggal 18 Mei 2020. Berdasar itu, yang menjadi Ketua Umum Partai Demokrat sampai saat ini adalah AHY," katanya.

Ia mengatakan yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam memutuskan keabsahan kepengurusan Partai Demokrat ialah AD/ART yang diserahkan ke Kemenkumham pada 2020. ● han

## KPU: Sampai Saat Ini Demokrat Masih Dipimpin AHY

JAKARTA (IM) - Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan sampai saat ini kepemimpinan Partai Demokrat yang sah adalah yang berada di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Adapun sahnya kepemimpinan dan kepengurusan partai terlihat dari terdaftar secara legal di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan memiliki Surat Keputusan (SK) Kemenkumham.

"Sampai saat ini kami masih memegang SK dari Kumham yang sampai saat ini masih SK Demokrat pimpinan Pak AHY,"

kata Ilham, Senin (8/3).

Ilham juga mengaku prihatin dengan konflik yang terjadi di internal Partai Demokrat. Ia pun menegaskan akan bekerja sesuai perundang-undangan yang berlaku.

"Sehingga sampai saat ini belum ada SK apapun dari Kumham yang datang ke kami, kemudian mengacu kepada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020," ujarnya. "Kami juga sampai saat ini masih memegang SK yang diberikan Kumham terakhir Partai Demokrat kepada kami," ucapnya.

Adapun AHY sampai di Kantor KPU sekitar pukul 12.39 WIB. Ia pun menyampaikan dua boks bukti bahwa

pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) pada Jumat (5/3) lalu adalah ilegal. Sebelum KPU, AHY juga menyambangi Kantor Kemenkumham pada Senin pagi ini. Ia menyampaikan 5 kontainer bukti KLB ilegal.

"Ada lima kontainer yang sudah kami siapkan untuk membuktikan bahwa apa yg dilakukan oleh GPK-PD, Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat, yang mengklaim telah melakukan kongres luar biasa tanggal 5 Maret 2021 di Deli Serdang Sumatera Utara memang benar-benar ilegal dan inkonstitusional," kata AHY di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Senin (8/3). ● han

## Jaksa Agung Pastikan Tahanan akan Dapat Vaksin Covid-19

JAKARTA (IM) - Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan semua tahanan Kejaksaan Agung (Kejagung) akan mendapatkan vaksin virus korona atau Covid-19.

"Pasti, pasti semua (dapat vaksin). Yang di sini semuanya kami vaksin. Sekitar 30 orang tahanan di sini," kata Burhanuddin kepada wartawan di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (8/3).

Burhanuddin menjelaskan bahwa pemberian vaksin itu nantinya dilakukan terhadap tahanan yang ditiupkan Keja-

gung ke sejumlah rutan milik instansi lain.

Meski begitu, Burhanuddin belum dapat memastikan kapan penyelenggaraan vaksinasi bagi tahanan kejaksaan akan digelar. Mengingat, saat ini pihaknya masih menggelar kegiatan vaksinasi bagi pegawai Kejagung hingga Jumat (12/3) mendatang. "Kami akan koordinasikan untuk dilakukan vaksin," ujarnya.

Dalam hal ini, dia menekankan bahwa seorang tahanan juga memiliki hak

untuk hidup. Oleh sebab itu, pemberian vaksin terhadap mereka perlu dilakukan.

Burhanuddin mengatakan, program vaksinasi ini pun sebenarnya ditujukan bagi seluruh warga Indonesia. Sehingga, tahanan juga mendapatkan.

"Gimanapun juga mereka punya hak untuk hidup. Ini kan untuk kebersamaan semua, bukan hanya untuk seseorang. Apakah tahanan juga tidak boleh untuk sehat? Ini kan semua, semua itu tentu bangsa Indonesia," tandasnya. ● han



IDN/ANTARA

## KETUA UMUM PARTAI DEMOKRAT AHY DATANG KE KEMENKUMHAM

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (tengah) menyerahkan berkas keabsahan organisasi dan AD/ART partai kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM Cahyo R Muzhar (bawah kedua kanan) di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin (8/3). AHY meminta pemerintah menyatakan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang ilegal dan inkonstitusional.

## Jhoni Allen sebagai Sekjen Partai Demokrat Versi KLB

JAKARTA (IM) - Mantan kader Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun didapuk sebagai sekretaris jenderal Partai Demokrat versi Konres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara.

Pengangkatan Jhoni Allen menjadi Sekjen Partai Demokrat versi KLB dibenarkan oleh politikus senior Partai Demokrat Max Sopacua yang juga salah satu pengagas KLB yang digelar di Deli Serdang, Jumat (5/3) lalu.

"Ya betul sekali (Jhoni Allen ditetapkan sebagai sekjen Demokrat)," kata Max saat dikonfirmasi, Senin (8/3).

Namun, Max belum mengungkap susunan lengkap kepengurusan Partai Demokrat yang dihasilkan melalui KLB Deli Serdang karena hal itu menjadi kewenangan tim formatur. Seperti diketahui KLB telah menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat dan mantan Sekretaris

## PENGUMUMAN

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT BERSAMA MERAH PRESTASI (MERAH PRESTASI) berkedudukan di Kabupaten Tangerang ("Perseroan") tertanggal 5 Maret 2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui Perseroan dan menunjuk Tuan GLENN ALINSKIE sebagai Likuidator.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini diumumkan kepada seluruh kreditur dan debitor Perseroan untuk menyelesaikan seluruh masalah utang piutang Perseroan dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini, dengan menghubungi Likuidator secara tertulis di alamat Piazza The Mozia ES-12, Kel.Lengkong Kulon, Kec.Pagedangan, Kab. Tangerang-Banten.

Persoalan-persoalan yang tidak diajukan kepada Likuidator dalam waktu 60 hari atau telah lewat dari jangka 60 hari tersebut, dianggap telah selesai dan tidak menjadi tanggung jawab Likuidator.

Demikian pengumuman ini disampaikan guna memenuhi ketentuan peraturan penundang-undangan yang berlaku.

Tangerang, 9 Maret 2021  
Likuidator

**PT BEBAS AKUNTANSI SISTEM**  
Berdomisili di Jakarta Selatan

**PENGUMUMAN TENTANG PENGAMBILALIHAN**

Pengumuman ini dibuat sesuai dengan ketentuan pasal 127 ayat (2) dan (8) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Direksi Perseroan **PT BEBAS AKUNTANSI SISTEM** ("Perseroan"), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berdomisili di Menara Anugrah 15<sup>th</sup> floor Jl. Mega Kuningan Barat Jakarta Selatan, dengan ini mengumumkan rencana penjualan dan pengalihan sebanyak 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham ditempatkan dan disetor dalam perseroan kepada calon investor. Penjualan dan pengalihan saham tersebut merupakan pengambilalihan atas saham yang telah dikeuarkan dan disetor Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 125 Ayat (3) UUPT. Setiap kreditur yang keberatan dengan rencana penjualan dan pengalihan saham, apabila ada paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengumuman ini dapat mengajukan keberatannya secara tertulis bersama dengan bukti yang sah kepada Direksi Perseroan ke alamat berikut:

**PT BEBAS AKUNTANSI SISTEM**  
Menara Anugrah 15<sup>th</sup> floor, Jl. Mega Kuningan Barat Jakarta Selatan.  
Jakarta, 9 Maret 2021  
Direksi  
**PT BEBAS AKUNTANSI SISTEM**

**PEMBERITAHUAN**

Dahulu perempuan bernama Lie Sun Chin dan suaminya bernama Alm. Suprijanto Kartadinata pernah mengangkut anak laki-laki yang diberi nama Tommy Leowaldy yang menurut informasi orang tua kandungnya lahir pada 08 Agustus tahun 1988, diangkat berdasarkan permohonan mertua Nny Lie Sun Chin yang bernama Alm.Ibu Satima yang pada tahun 1988 beralamat di Jalan Veteran No.17 Belawan, Medan Sumatera Utara, sehingga kepada pihak-pihak yang merasa telah menipikan anak dan atau memberikan anak tersebut kepada Alm.Ibu Satima, dapat menghubungi kami di nomor 021-58 58 333.

**KUASA HUKUM LIE SUN CHIN KANTOR HUKUM HARTONO & REKAN**  
Jalan Arles Asri, Komp. Taman Arles Blok E-6 No. 4 Lt.2, Jakarta Barat,

**PENGUMUMAN**

Dengan ini diumumkan kepada para Kreditur dan para Debitor perseroan bahwa **PT. MASSIVE TECHNOLOGY**, berkedudukan di Jakarta, telah dibubarkan terhitung mulai tanggal 01 Maret 2021 sebagaimana termata dari AKTA PEMBUBARAN tanggal 01 Maret 2021 nomor 03 yang dibuat oleh **KARLIS**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Magister Hukum, Notaris di Kabupaten Serang, dan kepada para Kreditur dan Para Debitor perseroan dipersilakan untuk menghubungi:

Team Likuidatur:  
Tn. WAWAN KOSWANDI  
Alamat: Jl. Kebon Kosong Gang II

Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini. Demikian disampaikan.

Team Likuidatur.